

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam, H.R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, cet.2. Jakarta : PTIK Press, 2005.

_____. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2 (Hukum Pidana Formil)*, Jakarta: Restu Agung, 2006.

_____. *Sistem Peradilan Pidana*, Cet.3. Jakarta: Restu Agung, 2007.

A. Carp, Robert dan Ronald Stidham, *Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat [Judicial Process in America]*. Diterjemahkan oleh Masri Maris. Departemen Luar Negeri A.S, 2001.

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.1. Jakarta: Rajawali, 1990.

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

_____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2007.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1996.

_____. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Cet. 3. Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1982.

Hadi Utomo, Warsito. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, cet.1. Jakarta :Prestasi Pustaka, 2005.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet, IV. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

- Harris, H, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam HIR*, Cet. 1. Jakarta: Binacipta, 1978.
- Ismail, Chaeruddin. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*, Jakarta: PTIK Press, 2007.
- Ismangil, Wagiono, *Pendekatan Sistem Dalam Managemen Organisasi*. Cet.1. Jakarta : Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1984.
- Kanter. E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet.1. Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Karjadi, M dan R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan Resmi dan Komentar*, Cet. 2. Bogor: Politeia, 1997.
- Kelana, Momo. *Memahami Undang-Undang Kepolisian*, cet.2. Jakarta : PTIK Press, 2002.
- Loudoe, John Z. *Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara*, Cet. 1. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- _____. *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. 14. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet.2. Semarang : Universitas Diponegoro, 2004.
- _____. dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet. 1. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, cet.2. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Podgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan. ed. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Poernomo, Bambang. *Pola Dasar Teori Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Projodikoro. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Aksara.

_____. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru.

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, cet.2. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997.

Shanor, Charles A dan L. Lynn Hogue. *National Security and Military Law in a Nutshell*, Atlanta: Thomson Weest, 2003.

Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet.2. Jakarta : AHAEM-PETEHAEM, 1985.

Sitompul, DPM. *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta : 2005.

Soegiri. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, cet.1. Jakarta : Indra Djaja, 1976.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. Jakarta : UI-Press, 1986.

_____. *Penegakan Hukum*, cet.1. Bandung : Binacipta, 1983.

_____. *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung: Citra Bakti, 1989.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

_____. *Ilmu Perundang-undangan (2) (Proses Dan Teknik Penyusunan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

S, Mertokusumo. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, cet.2. Yogyakarta : Liberty, 1999.

Sunny, Ismail. *Mencari Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Tambunan, A. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P) beserta Penjelasan, Latar Brlakang dan Proses Pembentukannya*, Cet. 1. Bandung: Binacipta . 1982.

Tresna, R. *Komentar HIR*, Cet. 17. Jakarta: Pridya Paramita, 2001.

B. ARTIKEL

Buaton, Tiarsen. "Sistem Peradilan militer Amerika Serikat" *Jurnal Hukum Militer Vol. I*, (1 September 2006): 43.

"Kompetensi Peradilan Militer," *Advokasi Hukum & Operasi Vol.2* (1 September 2006) : 13-23.

"Mahkamah Agung Amerika Serikat Pengadilan Tertinggi Di Amerika Serikat" *Isu-isu Demokrasi Journal USA*.

Sagala, Parluhutan. "Kedudukan Peradilan Militer Dalam Sistem Hukum Indonesia Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945" *Jurnal Hukum Militer Vol. I*, (1 September 2006): 24.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

_____, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____, Undang-Undang Tentang Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, UU No. 26 Tahun 1997, LN No. 74 Tahun 1997, TLN No. 3703.

_____, Undang-Undang Tentang Peradilan Militer, UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713.

_____, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No.4168.

_____, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, No. 4 Tahun 2004, LN No.8 Tahun 2004, TLN No.4358.

_____, Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, No. 34 Tahun 2004, LN No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439

Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kep. Panglima TNI. No. Kep/22/VIII/2005.

Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Admiministasi di Lingkungan Paradilan Militer. Surat Keputusan KABABINKUM TNI. No. Skep/186/X/1990.

D. INTERNET

"Ketua MA: RUU Peradilan Militer harus selaras UU terkait," <<http://www.rrionline.com/modules.php?name=Artikel&sid=25136>> 14 April 2007

KPK minta TNI ikut bergabung <<http://www.antara.co.id/arc/2007/11/29/kpk-minta-tni-ikut-bergabung/>>.25 Desember 2007.

Manan, Bagir. "Penindakan Militer tak Melulu Masalah Hukum," <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=14695&cl=Berita>>, 14 Maret 2007.

"152d Officer Basic Course Criminal Law Deskbook,"
<http://www.louisvillelaw.com/federal/military_law.htm>.
23 November 27.

"Pengaruh diadilinya Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Umum di Peradilan Umum terhadap eksistensi Peradilan Militer," <<http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel1/11903peradilan.htm>>, diakses 14 Maret 2007.

Wawancara khusus ketua KPK Taufiequrrachman Ruki
<<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?story=1341>>.
25 Desember 2007.

E. MAKALAH

Sihombing, PLT. "Perbandingan Sistem Peradilan Militer Indonesia dengan Amerika Serikat," (Makalah disampaikan pada Workshop tentang Peradilan Militer yang diselenggarakan FRR Law Office bekerjasama dengan Departemen Pertahanan RI), Kedutaan Besar Jerman dan Norwegia, Bogor, 27-29 Maret 2006.

Basar, Sonson. "Mengkaji Usulan Perubahan Kompetensi Peradilan Militer," (Makalah disampaikan pada Workshop tentang Peradilan Militer yang diselenggarakan FRR Law Office bekerjasama dengan Departemen Pertahanan RI), Kedutaan Besar Jerman dan Norwegia, Bogor, 27-29 Maret 2006.

F. WAWANCARA

Hasil wawancara penulis dengan Andi Hamzah salah satu dosen dan guru besar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 12 Desember 2007.

Hasil wawancara penulis dengan Bambang Widodo Umar salah satu dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) pada tanggal 17 Desember 2007.

